

GUNTINGAN - BERITA

HARI: Jumat, 1 Oktober 2021

1 BALI POST	4 NUSA BALI	7 WARTA BALI	10 TRIBUNE BALI	13 KORAN DOR
2 RADAR BALI	5 DENPOST	8 BALI TRIBUNE	11 POS BALI	14
3 BISNIS BALI	6 FAJAR BALI	9 BALI EXPRESS	12 MANGGALA	15

RANPERDA

Dewan Gianyar Kebut Enam Rancangan

GIANYAR, Radar Bali - Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Gianyar bekerja maraton untuk menuntaskan enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk menjadi Perda. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Gianyar, I Made Budiasa meyakinkan pada Oktober 2021, enam ranperda ini akan disahkan.

Budiasa menyatakan bahwa DPRD Gianyar sedang membahas dan menyempurnakan pembahasan. "Masih ada beberapa revisi oleh Pansus bersama Tim Ahli. Sehingga ketika disahkan, bisa berlaku," terang Budiasa, Kamis (30/9).

Dari enam Ranperda yang dibahas, dua di antaranya adalah ranperda inisiatif DPRD. Yakni Ranperda Perlindungan Bendesa dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sedangkan empat ranperda lainnya adalah Ranperda Penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Permukiman; Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan Ranperda Pengarusutamaan gender. "Keenam Perda ini yang hampir siap disahkan. Dan sudah mendapat persetujuan dari Kemendagri," imbuhnya.

Lanjut dia, DPRD Gianyar kini memiliki pekerjaan yang menumpuk. Sebab, ada pekerjaan rumah untuk menyelesaikan 25 Ranperda lagi. "Beberapa waktu lalu ada usulan baru dari eksekutif sebanyak 6 Ranperda," ujarnya.

Sejumlah usulan itu di antaranya, Ranperda Persetujuan Bangunan Gedung; Retribusi Bangunan Gedung; Perizinan Usaha berbasis risiko; Retribusi tenaga kerja asing; Penyelenggaraan Perlindungan Anak; dan Ranperda Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Dikatakan, dari keenam ranperda tersebut, Perda Retribusi Tenaga Kerja Asing dan Perlindungan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas termasuk Perda yang urgensi dibahas. "Usulan dari Eksekutif ada yang urgensi dibahas," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, apabila enam Ranperda yang digenjut tuntas, maka ke-25 Ranperda akan terus dilakukan pembahasan. Baik dibahas bersama tim ahli dan sosialisasi ke masyarakat. "Ya, kalau tidak selesai Tahun 2021 ini, dilanjutkan nanti 2022. Yang jelas dikerjakan dengan tahun berjalan," pungkasnya. (dra/pit)

HARI: Jumat, 1 Oktober 2021

1 BALI POST	4 NUSA BALI	7 WARTA BALI	10 TRIBUNE BALI	13 KORAN DOR
2 RADAR BALI	5 DENPOST	8 BALI TRIBUNE	11 POS BALI	14
3 BISNIS BALI	6 FAJAR BALI	9 BALI EXPRESS	12 MANGGALA	15

Pansus DPRD Gianyar Tuntaskan 6 Perda secara Marathon

Gianyar, Bali Tribune

Pandemi Covid-19 dengan segala pembatasannya, bukan menjadi alasan bagi DPRD Gianyar untuk menuntaskan pembahasan Raperda. Bahkan kini, melalui Pansus, Dewan Gianyar harus bekerja maraton untuk menuntaskan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk menjadi Perda.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Gianyar I Made Budiasa, Kamis (30/9/2021). Budiasa meyakini bahwa hingga Oktober 2021 ini akan disahkan. Meski diakuinya masih ada beberapa revisi oleh Pansus bersama Tim Ahli. Keenam Raperda yang dibahas, dua diantaranya adalah Raperda inisiatif dewan, Raperda Perlindungan Bendesa dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sedangkan keempat lainnya adalah Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Media Telekomunikasi dan Raperda Pengarusutamaan gender. "Keenam Perda ini yang hampir siap disahkan, dan sudah mendapat persetujuan dari Kemendagri," ujarnya lagi.

Dikatakan lagi, DPRD Gianyar kini memiliki pekerjaan yang menumpuk, dimana harus menyelesaikan 31 Raperda. "Sebelumnya ada 25 Raperda yang akan dibahas, namun beberapa waktu lalu ada tambahan atau usulan baru dari Eksekutif sebanyak 6 Raperda," ujarnya. Disebutkan poin

dari ke 6 Perda usulan eksekutif adalah: Persetujuan Bangunan Gedung, Retribusi Bangunan Gedung, Perijinan Usaha berbasis resiko, Retribusi tenaga kerja asing, Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Raperda Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dikatakannya, dari keenam Raperda tersebut, Perda Retribusi Tenaga Kerja Asing dan Perlindungan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas termasuk Perda yang urgensi dibahas. "Ya, usulan dari Eksekutif ada yang urgensi dibahas," tambahnya.

Dijelaskan dengan tuntasnya 6 Perda tersebut, maka ke 25 Perda akan terus dilakukan pembahasan, baik dengan tim ahli dan sosialisasi ke masyarakat. "Ya, kalau tidak selesai Tahun 2021 ini, dilanjutkan nanti 2022, yang jelas dikerjakan dengan tahun berjalan," tuntasnya. ata



I Made Budiasa

Bali Tribune

